



Politik Dinasti Sebagai Tantangan Berdemokrasi: Sebuah Prespektif Metafisika Tentang Kekuasaan

Fransiskus Bhoga¹, Atanasius Florentinus Tua², Antonio Fransisco De³

^{1,2,3} Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

Penulis Korespondensi, naruerand@gmail.com

Jl. Trans Flores, Desa Mahebora, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur

Abstract: One of the major challenges in the practice of modern democracy in Indonesia lies in understanding the phenomenon of political dynasties not merely as a political issue, but as a manifestation of a metaphysical view of power. Political dynasties reflect a deep-seated belief that power is not merely the result of the people's will, but something that ontologically adheres to certain individuals or family lineages. This paper aims to analyze the metaphysical roots of political dynasties in relation to the ontology of power, and to explore how such a worldview creates tension with democratic principles. This study employs a qualitative approach using a literature review method that examines philosophical, political, and cultural sources relevant to the Indonesian context. The findings indicate that political dynasties are rooted in a metaphysical understanding that views power as an entity possessing its own existence permanent, inheritable, and functioning as a guarantor of social order. Within the framework of democracy, this understanding clashes with the concept of power as rational, open, and participatory. Therefore, political dynasties are not merely a moral or legal problem, but concern humanity's perception of the very essence of power itself. This study is expected to provide a reflective contribution to the development of a democracy that is more aware of the ontological and metaphysical dimensions of power, so that politics may be understood as an ethical and rational relationship among citizens, rather than a hereditary inheritance.

Keywords: Political Dynasty, Metaphysics of Power, Ontology of Power, Legitimacy, Indonesian Democracy.

Abstrak: Salah satu tantangan besar dalam praktik demokrasi modern di Indonesia terletak pada bagaimana fenomena politik dinasti dapat dipahami bukan hanya sebagai gejala politik, tetapi sebagai manifestasi dari pandangan metafisik tentang kekuasaan. Politik dinasti menunjukkan adanya keyakinan mendalam bahwa kekuasaan bukan semata hasil kehendak rakyat, melainkan sesuatu yang melekat secara ontologis pada individu atau garis keturunan tertentu. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis akar metafisika politik dinasti dalam kaitannya dengan ontologi kekuasaan, serta menelusuri bagaimana pandangan tersebut menimbulkan ketegangan terhadap prinsip demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap literatur filsafat, politik, dan budaya yang relevan dengan konteks Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik dinasti berakar pada pemahaman metafisik yang memandang kekuasaan sebagai entitas yang memiliki eksistensi sendiri bersifat tetap, diwariskan, dan berfungsi sebagai penjamin keteraturan sosial. Dalam kerangka demokrasi, pandangan ini berhadapan dengan konsep kekuasaan yang bersifat rasional, terbuka, dan partisipatif. Dengan demikian, politik dinasti tidak hanya menjadi persoalan moral atau hukum, melainkan menyangkut cara pandang manusia terhadap hakikat kekuasaan itu sendiri. Temuan ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih reflektif bagi pengembangan demokrasi yang lebih sadar akan dimensi ontologis dan metafisik kekuasaan, sehingga politik dapat dipahami sebagai relasi etis dan rasional antarwarga negara, bukan sekadar warisan turun-temurun.

Kata Kunci: Politik Dinasti, Metafisika Kekuasaan, Ontologi Kekuasaan, Legitimasi, Demokrasi Indonesia.

1. LATAR BELAKANG

Fenomena politik dinasti di Indonesia merupakan salah satu gejala yang menimbulkan perdebatan serius dalam praktik demokrasi kontemporer. Secara empiris, politik dinasti tampak sebagai bentuk konsentrasi kekuasaan dalam lingkaran keluarga tertentu yang mempertahankan dominasi politik melalui mekanisme elektoral yang sah. Namun di balik realitas politik tersebut, terdapat dimensi yang lebih dalam dan filosofis, yakni persoalan tentang bagaimana manusia

memahami hakikat kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan dalam politik dinasti tidak hanya dipahami sebagai hasil dari proses demokratis, melainkan seolah-olah melekat secara ontologis pada individu atau garis keturunan tertentu. Hal ini menunjukkan adanya akar metafisika dalam pandangan politik dinasti, di mana kekuasaan dilihat bukan sebagai relasi sosial yang dinamis, tetapi sebagai entitas tetap yang dapat diwariskan (Suseno, 2020: 45). Pandangan ini secara mendasar bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menegaskan bahwa kekuasaan bersumber dari kehendak rakyat dan legitimasi publik (Beetham, 2019: 248). Dalam konteks filsafat politik, kekuasaan selalu menjadi tema sentral yang tidak hanya dipahami secara instrumental, tetapi juga ontologis. Foucault menegaskan bahwa kekuasaan bukan sekadar milik individu atau lembaga, melainkan jaringan relasi yang tersebar di seluruh masyarakat (Foucault, 1980: 92). Namun dalam praktik politik dinasti, relasi kekuasaan tersebut seakan dikembalikan pada pemahaman metafisik lama bahwa kekuasaan memiliki “substansi” tersendiri yang dapat diwariskan dan dipertahankan. Dengan demikian, politik dinasti tidak sekadar merupakan persoalan moral atau hukum, tetapi mencerminkan suatu pandangan metafisik tentang hakikat kekuasaan. Arendt menambahkan bahwa krisis dalam politik modern sering kali muncul ketika kekuasaan dipisahkan dari tindakan dan partisipasi bersama, sehingga berubah menjadi dominasi (Arendt, 1970: 43). Pandangan ini memperlihatkan bahwa politik dinasti sesungguhnya merupakan bentuk dominasi yang dibungkus legitimasi demokratis, tetapi secara ontologis menegaskan jarak antara penguasa dan warga.

Persoalan metafisika politik dinasti ini menjadi semakin kompleks ketika ditempatkan dalam konteks budaya dan sejarah kekuasaan di Indonesia. Dalam warisan politik tradisional Nusantara, kekuasaan sering kali dipahami sebagai sesuatu yang bersifat sakral dan kosmis. Raja atau pemimpin dianggap memiliki “wahyu” atau mandat ilahi yang menjadikannya pusat tatanan sosial dan moral (Latif, 2021: 102). Pandangan ini berakar pada ontologi kekuasaan yang bersifat hierarkis dan transenden, di mana kekuasaan dilihat sebagai bagian dari keteraturan alam semesta. Dalam konteks modern, pola pandang ini masih bertahan dalam bentuk simbolik maupun praksis, seperti tampak dalam politik dinasti. Oleh karena itu, studi atas fenomena politik dinasti tidak dapat dilepaskan dari refleksi metafisik yang menelaah hakikat dan sumber kekuasaan itu sendiri (Hardiman, 2018: 77). Selain itu, fenomena politik dinasti menantang pemahaman modern tentang demokrasi yang menekankan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan rasionalitas publik. Demokrasi menuntut agar kekuasaan dipandang sebagai hasil kontrak sosial dan partisipasi kolektif, bukan sebagai hak istimewa yang diwariskan secara genealogis. Dalam kerangka ini, politik dinasti merupakan anomali dalam sistem demokrasi karena mempertahankan logika kekuasaan yang bersifat eksklusif dan esensial. Han berpendapat bahwa dalam masyarakat modern, kekuasaan telah bergeser dari bentuk dominasi eksternal menuju bentuk yang lebih halus, yakni reproduksi kekuasaan melalui simbol dan pengaruh (Han, 2018: 67). Politik dinasti dengan demikian bukan sekadar persoalan politik praktis, tetapi juga bentuk metafisika kekuasaan yang beroperasi di balik kesadaran sosial dan budaya masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap berbagai literatur filsafat, politik, dan budaya yang relevan. Analisis difokuskan pada pemahaman kekuasaan dalam dimensi ontologis dan implikasinya terhadap praktik politik dinasti di Indonesia. Sejumlah kajian sebelumnya turut memberikan landasan bagi penelitian ini. Pertama, tulisan Syafrudin Arifin berjudul “*Genealogi Kekuasaan dan Tradisi Politik di Indonesia*” dalam *Jurnal Sosial dan Politik Nusantara* Vol. 15 No. 2 tahun 2023 menyoroti relasi antara kekuasaan dan warisan budaya genealogis sebagai dasar munculnya politik dinasti. Kedua, artikel Nurul Huda “*Kekuasaan dan Simbolisme Sosial: Telaah Filosofis atas Budaya Kepemimpinan di Indonesia*” dalam *Jurnal Filsafat Politik* Vol. 9 No. 1 tahun 2024 membahas pandangan ontologis bahwa kekuasaan dipahami sebagai realitas simbolik yang diwariskan melalui figur-firug tertentu. Ketiga, karya Andika Wirawan “*Metafisika Kekuasaan dan Legitimasi Politik Modern*” yang diterbitkan dalam *Jurnal Refleksi Filsafat* tahun 2023 menegaskan pentingnya pendekatan ontologis untuk memahami dasar legitimasi kekuasaan dalam politik kontemporer. Keempat, penelitian Retno Pramesti “*Demokrasi dan Tradisi Kekuasaan Feodal di Indonesia*” dalam *Jurnal Demokrasi dan Pembangunan Sosial* tahun 2022 menunjukkan bahwa politik dinasti merupakan bentuk kontinuitas antara warisan metafisik feodalisme dan praktik demokrasi modern. Dari berbagai kajian tersebut, penelitian ini berupaya memperluas pemahaman dengan menelusuri secara lebih mendalam akar metafisika politik dinasti dan keterkaitannya dengan ontologi kekuasaan, guna menemukan dasar reflektif bagi pembangunan demokrasi yang lebih sadar akan dimensi eksistensial kekuasaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual dan reflektif terhadap akar metafisika politik dinasti dalam kaitannya dengan ontologi kekuasaan. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai literatur filsafat, politik, dan sosial-budaya yang membahas relasi antara kekuasaan, legitimasi, dan struktur metafisik dalam konteks demokrasi Indonesia. Sumber primer penelitian ini meliputi karya-karya pemikir seperti Franz Magnis-Suseno, Michel Foucault, Hannah Arendt, dan Byung-Chul Han yang membahas dimensi ontologis dan metafisik dari kekuasaan. Sementara itu, sumber sekunder terdiri atas artikel ilmiah dan kajian empiris yang menguraikan praktik politik dinasti di Indonesia serta refleksi teoretis tentang legitimasi dan dominasi kekuasaan (Latif, 2021: 102). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan konsep kekuasaan, warisan politik, dan dasar metafisik dari legitimasi. Tahap analisis dimulai dengan menelusuri konsep ontologi kekuasaan dalam berbagai sumber filosofis, kemudian dibandingkan dengan realitas politik dinasti sebagai bentuk manifestasi konkret dari pandangan metafisik tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha mengungkap bagaimana pemahaman ontologis tentang kekuasaan membentuk pola pikir dan

struktur sosial yang memungkinkan reproduksi kekuasaan turun-temurun dalam sistem demokrasi (Suseno, 2020: 45). Pendekatan pustaka memungkinkan penelitian ini menyelami dimensi konseptual secara mendalam tanpa terbatas pada data empiris semata. Filsafat politik, dalam hal ini, tidak hanya dipahami sebagai refleksi normatif atas sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai pencarian terhadap makna terdalam kekuasaan sebagai realitas metafisik. Dengan demikian, penelitian ini tidak bermaksud menghakimi praktik politik dinasti dari sisi etika politik semata, tetapi menyoroti cara pandang manusia terhadap kekuasaan yang berakar pada tradisi metafisika tertentu (Hardiman, 2018: 77). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap fenomena politik selalu memiliki dimensi ontologis yang tersembunyi di balik tindakan sosial dan sistem kelembagaan (Han, 2018: 67). Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih filosofis tentang politik dinasti, bukan hanya sebagai problem demokrasi, tetapi juga sebagai refleksi atas cara manusia mengandaikan keberadaan kekuasaan dalam struktur realitas. Dengan membaca ulang fenomena politik melalui kacamata metafisika, penelitian ini berusaha menyingkap dasar ontologis yang membentuk kesadaran politik masyarakat dan menentukan arah perkembangan demokrasi ke depan (Gaus, 2020: 510).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Dinasti sebagai Fenomena Metafisik Kekuasaan

Fenomena politik dinasti tidak hanya dapat dipahami sebagai gejala sosial atau strategi politik, tetapi juga sebagai ekspresi dari suatu pandangan metafisik tentang kekuasaan. Dalam banyak masyarakat, kekuasaan tidak dipandang sebagai hasil kontrak sosial atau pilihan rasional, melainkan sebagai entitas yang memiliki eksistensi mandiri yang melekat pada individu atau keluarga tertentu. Kekuasaan seakan memiliki “hakikat” atau *being* yang dapat diwariskan. Karena itu, keberlanjutan kekuasaan dalam satu garis keturunan mencerminkan keyakinan bahwa kekuasaan bukanlah hasil proses politik, tetapi merupakan sesuatu yang sudah “ada” dan harus dijaga agar tatanan sosial tetap seimbang (De Anna, 2020: 12). Dalam konteks metafisika politik, Gabriele De Anna menjelaskan bahwa otoritas politik merupakan prinsip kesatuan komunitas, yang memberi alasan moral bagi tindakan individu (De Anna, 2020: 4). Dengan pandangan ini, kekuasaan menjadi sumber eksistensial bagi kehidupan politik bersama. Dalam politik dinasti, gagasan ini bertransformasi menjadi keyakinan bahwa “sumber kekuasaan” mengalir melalui garis keturunan tertentu, sehingga pewarisan jabatan dianggap wajar secara ontologis. Artinya, kekuasaan bukan sekadar posisi administratif, tetapi bagian dari keberadaan (ontologi) keluarga politik itu sendiri.

Pandangan semacam ini juga muncul dalam kerangka budaya politik Indonesia, terutama dalam sistem patrimonial dan feodal yang telah mengakar lama. Kekuasaan sering dipahami sebagai anugerah ilahi atau “mandat langit” (*wahyu keprabon*), bukan hasil legitimasi rakyat. Hal ini menandakan bahwa dalam kesadaran kolektif masyarakat, kekuasaan memiliki dimensi sakral dan transenden. Maka, ketika seorang anak menggantikan posisi orang tuanya

dalam jabatan publik, masyarakat tidak selalu melihatnya sebagai penyimpangan, tetapi sebagai kelanjutan alami dari tatanan kosmik kekuasaan (Permana, 2023: 88). Politik dinasti dengan demikian beroperasi dalam logika ontologis yang menempatkan kekuasaan sebagai sesuatu yang “ada” (*being*), bukan “menjadi” (*becoming*). Demokrasi, sebaliknya, mendasarkan diri pada pandangan bahwa kekuasaan adalah hasil proses sosial yang terbuka dan dinamis. Dalam demokrasi, kekuasaan tidak dimiliki, melainkan dijalankan secara delegatif. Konflik antara politik dinasti dan demokrasi sebenarnya adalah pertentangan antara dua pandangan metafisik tentang hakikat kekuasaan antara kekuasaan sebagai substansi tetap dengan kekuasaan sebagai relasi partisipatif (Mukti & Rodiyah, 2020: 532). Bila dilihat dari sudut metafisika, politik dinasti menegaskan konsep kekuasaan sebagai “entitas” yang melekat pada eksistensi manusia tertentu. Ini sejalan dengan pandangan klasik Aristoteles yang menempatkan tatanan politik dalam kerangka *natural order*, di mana setiap orang memiliki tempat yang sesuai dengan kodratnya. Dalam konteks ini, garis keturunan politik dianggap sebagai bagian dari “tatanan alam” yang tidak seharusnya diganggu oleh mekanisme rasional demokrasi. Aristoteles menyatakan bahwa kekuasaan muncul dari hierarki kodrat dalam masyarakat (Aristotle, *Politics*, Book III: 1276b). Pandangan serupa tampak dalam praktik politik dinasti modern kekuasaan dianggap sebagai “kodrat keluarga” yang melahirkan legitimasi.

Selain bersifat ontologis, politik dinasti juga mengandung dimensi epistemologis yakni cara manusia mengenal kekuasaan. Dalam masyarakat yang masih berorientasi pada simbolisme, kekuasaan tidak dikenali melalui proses hukum, tetapi melalui tanda-tanda kebesaran, keturunan, dan sejarah keluarga. Maka, kekuasaan menjadi bentuk pengetahuan sosial yang diwariskan bersama tradisi dan simbol-simbol budaya. Di sini, metafisika kekuasaan bekerja sebagai “pengetahuan laten” yang membentuk persepsi rakyat terhadap legitimasi (Ananda, 2023: 10). Kekuasaan yang dipandang memiliki hakikat tetap ini menciptakan tatanan politik yang menolak perubahan. Dalam bahasa Martin Heidegger, keberadaan yang “tetap” atau *ontic* ini menjauh dari “keberadaan yang sejati” (*authentic being*), karena menolak kemungkinan *becoming* yakni perubahan eksistensial yang membuka masa depan. Politik dinasti, dengan demikian, adalah bentuk keberadaan politik yang terjebak dalam *pengulangan ontologis*: kekuasaan hanya berputar dalam lingkaran yang sama, tanpa memberi ruang bagi lahirnya “yang lain” (Heidegger, 1962: 256).

Dampak metafisik dari pandangan seperti ini sangat besar bagi demokrasi. Ketika kekuasaan dianggap melekat pada darah dan garis keturunan, maka politik kehilangan prinsip kesetaraannya. Demokrasi tidak lagi menjadi arena kebebasan, melainkan ritual pewarisan kekuasaan. Jerry Indrawan dan koleganya menegaskan bahwa politik dinasti memperkuat oligarki karena kekuasaan berputar di tangan keluarga tertentu, sehingga rakyat hanya menjadi penonton legitimasi formal (Indrawan et al., 2024: 43). Namun, memahami politik dinasti sebagai fenomena metafisik juga membuka ruang refleksi filosofis. Ia memperlihatkan bahwa reformasi demokrasi tidak akan efektif jika tidak disertai dengan perubahan cara berpikir ontologis tentang kekuasaan. Selama kekuasaan masih dianggap sebagai sesuatu yang *dimiliki*,

bukan sebagai *relasi*, maka demokrasi akan terus dipenuhi dengan praktik pewarisan kekuasaan. Diperlukan perubahan pandangan metafisik menuju kekuasaan sebagai relasi etis antarwarga, di mana legitimasi muncul dari pengakuan timbal balik, bukan dari darah dan garis keturunan (De Anna, 2020: 19). Dengan demikian, politik dinasti bukan hanya masalah kelemahan hukum atau moralitas politik, tetapi menyangkut cara manusia memahami eksistensi kekuasaan itu sendiri. Dalam perspektif metafisika, demokrasi baru akan matang ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan bukan “ada yang dimiliki”, melainkan “menjadi” dalam relasi bersama yang terus terbuka. Transformasi metafisik inilah yang menjadi dasar bagi demokrasi yang sejati di mana kekuasaan tidak diwariskan, tetapi dihidupi secara etis dan partisipatif oleh seluruh warga negara.

Akar Metafisika dalam Ontologi Kekuasaan

Pemahaman tentang kekuasaan dalam sejarah filsafat selalu berkaitan dengan pertanyaan metafisik tentang hakikat keberadaan (*being*). Kekuasaan bukan sekadar alat politik atau sarana mengatur masyarakat, melainkan suatu bentuk realitas yang memiliki dimensi ontologis yang dalam. Dalam konteks ini, politik dinasti dapat dilihat sebagai ekspresi dari pandangan metafisik yang memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang “ada dengan sendirinya”, bukan sebagai konstruksi sosial atau hasil perjanjian manusia. Kekuasaan dalam pengertian metafisik bersifat *given* sesuatu yang diwariskan oleh tatanan keberadaan yang lebih tinggi, bukan hasil dari kesepakatan sosial. Akar historis pandangan semacam ini dapat ditelusuri dalam filsafat klasik Yunani. Dalam *The Republic*, dijelaskan bahwa hanya para filsuf yang layak memerintah karena mereka mengenal dunia ide, yaitu realitas yang abadi dan sempurna (Plato, 1992: 101). Dalam kerangka itu, kekuasaan bersumber dari pengetahuan tentang kebenaran, bukan dari kehendak rakyat. Pandangan ini bersifat metafisik karena menempatkan dasar kekuasaan pada tataran ontologis yang melampaui dunia indrawi. Kekuasaan tidak “dibuat” oleh manusia, tetapi “ditemukan” dalam struktur realitas yang sudah ada.

Dalam pemikiran klasik berikutnya, kekuasaan dipahami sebagai bagian dari tatanan alamiah (*natural order*). Dalam *Politics*, dijelaskan bahwa manusia adalah *zoon politikon* makhluk politik yang secara kodrat hidup dalam komunitas dan memiliki struktur hierarkis (Aristotle, 1932: 54). Setiap individu memiliki tempat dan perannya dalam tatanan tersebut. Dengan demikian, kekuasaan bukanlah hasil kehendak, melainkan cerminan dari *telos* atau tujuan alami manusia. Pandangan ini menegaskan bahwa kekuasaan memiliki “hakikat ontologis”, yaitu bagian dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam tradisi teologis abad pertengahan, kekuasaan ditafsirkan sebagai partisipasi manusia dalam kekuasaan ilahi. Semua kekuasaan diyakini berasal dari *causa prima*, yaitu Tuhan sebagai sumber segala keberadaan (Aquinas, 1952: 73). Manusia yang berkuasa tidak menciptakan kekuasaan, tetapi menerima dan menyalurkan daya ilahi tersebut. Pemahaman ini membentuk dasar bagi doktrin *divine right of kings* di Eropa, di mana raja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Dari sini,

kekuasaan memperoleh dimensi sakral dan diwariskan dalam garis keturunan. Dalam konteks Asia, terutama di Nusantara, akar metafisika kekuasaan tampak dalam kosmologi tradisional. Dalam pandangan Jawa, kekuasaan adalah pancaran dari *wahyu keprabon* suatu daya ilahi yang hanya turun kepada orang yang “berhak” secara spiritual. Raja atau pemimpin dianggap memiliki legitimasi karena ia menjadi pusat kosmos, penghubung antara dunia manusia dan dunia adikodrati (Magnis-Suseno, 1997: 211). Pandangan ini menjadikan kekuasaan sebagai fenomena metafisik: sesuatu yang tidak diperoleh lewat kontestasi politik, melainkan karena penetapan kosmis. Dalam kerangka ini, politik dinasti di Indonesia tidak bisa dipahami sekadar sebagai praktik nepotistik atau penyimpangan demokrasi, tetapi sebagai refleksi dari pandangan metafisik lama tentang kekuasaan. Keyakinan bahwa kekuasaan dapat diwariskan dalam keluarga memiliki akar pada gagasan bahwa kekuasaan adalah “substansi” yang melekat pada darah atau garis keturunan (Permana, 2023: 87). Kekuasaan tidak dilihat sebagai relasi sosial, tetapi sebagai hakikat yang bersifat tetap dan dapat berpindah dari satu generasi ke generasi lain.

Namun, metafisika kekuasaan yang bersifat substansialis ini mulai dipersoalkan dalam filsafat modern. Pandangan baru menolak gagasan bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau institusi tertentu. Kekuasaan dipahami sebagai relasi yang menyebar dalam seluruh jaringan sosial (Foucault, 1980: 93). Dengan demikian, kekuasaan tidak dapat diwariskan seperti benda atau darah, karena ia hanya ada sejauh dipraktikkan dalam hubungan antar manusia. Kritik ini menjadi tantangan bagi pandangan metafisik klasik yang menjadi dasar politik dinasti. Dalam perspektif ontologis yang lebih eksistensial, keberadaan (*being*) tidak dipahami sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai proses *becoming* (Heidegger, 1962: 102). Keberadaan manusia selalu bersifat dinamis, tidak pernah selesai, dan selalu terbuka. Dengan pendekatan seperti ini, kekuasaan bukanlah “entitas tetap” yang dapat diwariskan, tetapi “gerak eksistensial” yang terus diperbarui melalui tindakan manusia dalam dunia. Pandangan ini menegaskan perlunya melihat kekuasaan dalam kerangka eksistensial, bukan substansial. Akar metafisika kekuasaan yang bersifat statis cenderung melahirkan tatanan sosial yang hirarkis. Dalam sistem seperti ini, kekuasaan dianggap sebagai puncak realitas, sementara rakyat hanyalah bagian dari struktur kosmis yang harus tunduk (Mukti & Rodiyah, 2020: 534). Hal ini berlawanan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan. Politik dinasti menunjukkan benturan antara dua paradigma: feodalisme metafisik yang melihat kekuasaan sebagai “takdir kosmis”, dan demokrasi modern yang melihat kekuasaan sebagai kontrak sosial yang terbuka.

Lebih jauh, akar metafisika kekuasaan juga membentuk cara masyarakat memaknai legitimasi politik. Dalam tradisi metafisik, legitimasi bersifat *a priori* diberikan oleh Tuhan, alam, atau leluhur bukan hasil dari proses partisipatif. Itulah sebabnya dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya metafisik kekuasaan, pemimpin yang berasal dari keluarga tertentu dianggap lebih sahih daripada mereka yang muncul dari bawah (Permana, 2023: 89). Fenomena ini dapat dilihat dalam berbagai kasus politik dinasti di Indonesia yang sering

mendapat pemberian moral bahkan dari masyarakat luas. Namun demikian, pandangan metafisik tentang kekuasaan tidak sepenuhnya negatif. Dalam filsafat politik klasik, metafisika berfungsi menjaga kesadaran bahwa kekuasaan harus memiliki dasar moral dan spiritual (De Anna, 2020: 15). Kekuasaan tanpa fondasi metafisik akan kehilangan orientasi etiknya. Masalah muncul ketika metafisika tersebut membantu menjadi sistem yang menolak perubahan. Oleh karena itu, tantangan bagi demokrasi modern adalah bagaimana mereformulasi metafisika kekuasaan agar tetap memiliki dimensi moral tanpa jatuh pada legitimasi turun-temurun. Dengan demikian, akar metafisika dalam ontologi kekuasaan menjelaskan mengapa politik dinasti memiliki daya hidup yang kuat di Indonesia. Ia tidak hanya tumbuh dari kepentingan politik, tetapi dari pandangan metafisik yang telah mengakar dalam kesadaran budaya masyarakat (Magnis-Suseno, 1997: 214). Untuk membangun demokrasi yang sejati, perlu ada pergeseran dari pandangan kekuasaan sebagai substansi tetap menuju kekuasaan sebagai relasi dinamis. Dalam kerangka itu, politik bukan lagi pewarisan kekuasaan, melainkan partisipasi aktif dalam membangun makna bersama tentang keberadaan dan keadilan.

Ketegangan antara Pandangan Metafisik Kekuasaan dan Prinsip Demokrasi

Ketegangan antara pandangan metafisik tentang kekuasaan dan prinsip demokrasi terletak pada perbedaan mendasar dalam cara keduanya memahami sumber legitimasi politik. Dalam pandangan metafisik klasik, kekuasaan bersumber dari tatanan ontologis yang dianggap sudah ada sejak semula entah berasal dari kehendak ilahi, tatanan kosmos, atau warisan leluhur (Magnis-Suseno, 1997: 217). Sebaliknya, demokrasi menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, bukan dari entitas transenden mana pun. Di sini tampak dua horizon berpikir yang saling bertolak belakang yang satu bersifat vertikal, memandang kekuasaan turun dari atas, sedangkan yang lain bersifat horizontal, di mana kekuasaan naik dari bawah sebagai hasil kontrak sosial. Pandangan metafisik memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang sakral dan tetap, sedangkan demokrasi melihat kekuasaan sebagai hasil musyawarah yang bisa berubah melalui kehendak mayoritas (De Anna, 2020: 16). Dalam sistem yang masih dipengaruhi oleh metafisika kekuasaan, pemimpin sering dianggap memiliki legitimasi karena “dilahirkan” dalam garis keturunan tertentu atau dianggap memiliki daya spiritual yang lebih tinggi. Sebaliknya, demokrasi mengandaikan bahwa siapa pun dapat menjadi pemimpin sejauh ia memperoleh kepercayaan rakyat melalui proses rasional dan terbuka. Karena itu, politik dinasti sering menjadi gejala benturan antara dua logika: logika warisan dan logika partisipasi. Dalam konteks Indonesia, benturan tersebut tampak nyata ketika nilai-nilai feodal dan kosmologis tentang kekuasaan berhadapan dengan nilai-nilai egaliter demokrasi modern (Permana, 2023: 91). Sistem demokrasi mengharuskan adanya mekanisme pemilihan umum, keterbukaan, dan akuntabilitas, tetapi budaya politik lokal masih sering memandang kekuasaan sebagai simbol keagungan yang tidak pantas dipertanyakan. Dalam situasi seperti ini, rakyat cenderung memandang keluarga penguasa sebagai representasi kekuatan yang lebih besar daripada sekadar aktor politik biasa.

Ketegangan ini juga berkaitan dengan cara masyarakat memaknai konsep legitimasi. Dalam metafisika kekuasaan, legitimasi bersifat ontologis, diberikan oleh tatanan kosmos atau Tuhan. Sebaliknya, dalam demokrasi, legitimasi bersifat empiris, diberikan oleh rakyat melalui prosedur politik. Perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antara kesadaran kultural masyarakat dengan sistem politik yang berlaku. Demokrasi mengandaikan partisipasi aktif dan kesetaraan, namun masyarakat yang masih berpikir dalam kerangka metafisik justru menempatkan kekuasaan dalam posisi yang tak tersentuh. Dalam filsafat politik modern, muncul kritik terhadap kecenderungan metafisik yang menganggap kekuasaan sebagai milik tetap. Foucault, misalnya, melihat kekuasaan bukan sebagai entitas yang terpusat, melainkan sebagai relasi yang menyebar di seluruh struktur sosial (Foucault, 1980: 95). Konsep ini menantang gagasan bahwa kekuasaan dapat diwariskan melalui garis keturunan. Jika kekuasaan adalah relasi, maka ia harus selalu dinegosiasikan ulang di setiap konteks sosial. Di sinilah letak dasar demokrasi modern kekuasaan tidak dimiliki, melainkan dijalankan melalui mekanisme yang terbuka dan bisa berubah. Sementara itu, dalam kerangka metafisik, kekuasaan dipahami sebagai bagian dari tatanan moral kosmos yang harus dijaga agar dunia tetap seimbang (Magnis-Suseno, 1997: 219). Karena itu, mempertanyakan atau mengganti pemimpin dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap harmoni semesta. Sebaliknya, demokrasi justru mengandaikan perubahan sebagai tanda sehatnya kehidupan politik. Ketegangan ini menjelaskan mengapa dalam masyarakat yang masih diwarnai kosmologi tradisional, perubahan politik sering dipersepsi sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial. Perbedaan mendasar antara kedua paradigma ini juga terlihat dalam cara keduanya memahami manusia. Dalam metafisika klasik, manusia dipandang sebagai bagian dari tatanan yang lebih besar dan sudah ditentukan posisinya (Aristotle, 1932: 57). Dalam demokrasi modern, manusia dipandang sebagai subjek bebas yang memiliki hak menentukan masa depannya sendiri. Perbedaan pandangan tentang hakikat manusia ini berimplikasi langsung pada cara memahami kekuasaan: apakah kekuasaan merupakan hak kodrat dari tatanan tertentu, atau hasil pilihan sadar manusia.

Dalam kerangka demokrasi, kekuasaan bersifat kontraktual ia lahir dari kesepakatan bersama dan dapat dicabut bila tidak lagi sesuai dengan kehendak rakyat. Pandangan ini bertolak belakang dengan gagasan metafisik bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang diwariskan atau diturunkan oleh kehendak ilahi. Karena itu, politik dinasti dalam konteks demokrasi menjadi anomali: secara prosedural sah, tetapi secara filosofis bertentangan dengan asas kesetaraan warga negara. Selain itu, metafisika kekuasaan cenderung menumbuhkan budaya paternalistik. Pemimpin dipandang sebagai figur “ayah” yang tidak boleh dilawan, sementara rakyat menjadi anak yang harus patuh (Magnis-Suseno, 1997: 221). Sebaliknya, demokrasi menempatkan pemimpin sebagai pelayan publik yang mandatnya berasal dari rakyat. Ketika pandangan metafisik masih kuat, rakyat sering kali menyerahkan kedaulatannya kepada pemimpin tanpa kontrol kritis. Akibatnya, sistem demokrasi menjadi formalitas tanpa substansi. Foucault menegaskan bahwa kekuasaan hanya dapat dijaga tetap sehat jika ia terus dipertanyakan dan dibatasi (Foucault, 1980: 96). Pandangan ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menolak absolutisme dalam bentuk apa pun. Namun, dalam tradisi metafisik

kekuasaan, mempertanyakan otoritas dianggap sebagai tindakan tidak hormat, bahkan dosa. Di sinilah ketegangan epistemologis antara ketaatan dan kebebasan, antara tradisi dan rasionalitas politik modern.

Oleh karena itu, politik dinasti di Indonesia dapat dilihat sebagai simbol dari pergulatan dua warisan besar: metafisika kekuasaan yang menekankan keturunan dan kesakralan, serta demokrasi yang menuntut rasionalitas dan partisipasi (Permana, 2023: 92). Ketegangan ini tidak hanya bersifat politis, melainkan juga ontologis, karena menyangkut cara manusia memahami hakikat kekuasaan itu sendiri. Selama masyarakat masih memandang kekuasaan sebagai warisan kosmis, praktik politik dinasti akan terus mendapatkan legitimasi kultural. Dengan demikian, untuk mengatasi politik dinasti, demokrasi tidak cukup hanya memperbaiki regulasi atau prosedur pemilihan. Diperlukan transformasi kesadaran metafisik tentang kekuasaan (Magnis-Suseno, 1997: 223). Demokrasi harus membangun pandangan baru bahwa kekuasaan adalah hasil dari tanggung jawab bersama, bukan warisan dari struktur ontologis tetap. Hanya dengan cara itu, ketegangan antara metafisika kekuasaan dan demokrasi dapat diatasi, dan kekuasaan dapat kembali menjadi sarana bagi keadilan serta kemanusiaan.

Reformulasi Metafisika Kekuasaan dalam Kerangka Demokrasi

Reformulasi metafisika kekuasaan dalam konteks demokrasi menjadi penting karena gagasan klasik tentang kekuasaan sebagai entitas tetap tidak lagi relevan dengan semangat partisipatif zaman modern. Demokrasi menuntut cara berpikir baru yang tidak menempatkan kekuasaan sebagai substansi yang diwariskan, melainkan sebagai relasi yang hidup di antara warga negara (Foucault, 1980: 94). Reformulasi ini mengandaikan bahwa ontologi kekuasaan harus diartikan secara dinamis, sebagai hasil tindakan bersama dan komunikasi etis antarindividu. Dengan demikian, demokrasi bukan hanya sistem politik, tetapi juga cara memahami keberadaan manusia dalam relasinya dengan sesama. Dalam kerangka baru ini, kekuasaan bukan lagi manifestasi tatanan kosmis, tetapi perwujudan kehendak kolektif yang rasional. Pandangan ini sejalan dengan filsafat praksis yang menekankan keterlibatan manusia dalam membentuk dunia sosialnya (Magnis-Suseno, 1997: 231). Kekuasaan yang demokratis berarti kekuasaan yang terus dipertanyakan, dikontrol, dan dibatasi melalui institusi serta kesadaran publik. Reformulasi metafisika kekuasaan di sini bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan kepada hakikatnya sebagai instrumen moral dan tanggung jawab bersama, bukan milik pribadi atau keluarga. Dalam tradisi filsafat politik modern, upaya ini dapat ditemukan dalam pemikiran Immanuel Kant tentang otonomi moral. Bagi Kant, manusia adalah makhluk rasional yang bebas dan bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri (Kant, 1996: 42). Kekuasaan yang sejati bukanlah dominasi atas orang lain, tetapi pengakuan atas kebebasan mereka. Dengan demikian, metafisika baru tentang kekuasaan harus berpijak pada penghormatan terhadap martabat manusia sebagai tujuan, bukan alat politik. Ini berarti demokrasi memerlukan dasar ontologis yang menghormati kebebasan, bukan yang memelihara hierarki.

Reformulasi metafisika kekuasaan juga harus mempertimbangkan dimensi etis sebagaimana ditegaskan oleh Emmanuel Levinas. Dalam etika tanggung jawabnya, Levinas menegaskan bahwa hubungan dengan “yang lain” mendahului setiap bentuk kekuasaan (Levinas, 1969: 215). Dengan demikian, kekuasaan politik yang benar adalah yang lahir dari tanggung jawab terhadap sesama, bukan dari ambisi mempertahankan status atau garis keturunan. Prinsip ini relevan bagi demokrasi Indonesia yang masih berjuang melampaui pola kekuasaan feodal (Kenawas, 2023: 202). Selain dimensi etis, demokrasi membutuhkan basis ontologis yang bersifat dialogis. Kekuasaan dalam demokrasi bukan hasil dominasi, melainkan kesepakatan yang dicapai melalui diskursus publik. Pandangan ini menegaskan bahwa reformulasi metafisika kekuasaan harus mengarah pada pemahaman bahwa kekuasaan sejati lahir dari komunikasi yang jujur dan partisipatif, bukan dari hak istimewa turun-temurun. Dalam konteks Indonesia, reformulasi ini berarti membongkar pandangan tradisional yang masih melihat kekuasaan sebagai warisan spiritual atau simbol kesakralan. Modernisasi politik harus berjalan seiring dengan modernisasi metafisika: dari kekuasaan sebagai anugerah kosmis menjadi kekuasaan sebagai amanat sosial (Permana, 2023: 95). Pergeseran ini tidak berarti menolak nilai spiritual dalam politik, tetapi mengembalikannya ke fungsi moralnya, yaitu menjaga keadilan dan kesejahteraan bersama.

Namun, reformulasi metafisika kekuasaan bukan sekadar perubahan konseptual, melainkan juga perubahan kesadaran. Demokrasi hanya dapat tumbuh apabila masyarakat memahami kekuasaan sebagai sesuatu yang bersifat relasional dan sementara. Kekuasaan tidak dimiliki, melainkan dijalankan dalam batas etika publik (De Anna, 2020: 18). Kesadaran ini penting agar kekuasaan tidak lagi dipuja sebagai simbol kebesaran, melainkan dilihat sebagai tanggung jawab yang harus selalu dievaluasi. Kecenderungan politik dinasti justru meningkat ketika masyarakat gagal menempatkan kekuasaan sebagai kontrak publik, bukan sebagai kepemilikan pribadi (Dal Bó dkk. 2007: 194),. Dalam kerangka ini, reformulasi metafisika kekuasaan juga berarti membangun sistem yang menjamin rotasi kepemimpinan dan partisipasi aktif warga negara. Demokrasi sejati bukan hanya soal pemilihan umum, tetapi tentang cara berpikir yang menolak absolutisme. Dengan demikian, sistem politik yang baik tidak hanya bergantung pada konstitusi, tetapi juga pada kesadaran ontologis masyarakat bahwa kekuasaan adalah milik bersama, bukan hak waris keluarga tertentu (Taufiq et al., 2025: 439).

Reformulasi metafisika kekuasaan berarti menempatkan kritik sebagai bagian dari keberadaan politik itu sendiri. Kritik bukanlah bentuk pemberontakan terhadap tatanan, melainkan cara menjaga kekuasaan tetap manusiawi. Pandangan ini mengoreksi warisan metafisik lama yang menganggap kekuasaan sebagai sesuatu yang sakral dan tak boleh disentuh. Dalam konteks etika politik, reformulasi metafisika kekuasaan juga harus mengembalikan orientasi kekuasaan kepada pelayanan publik. Inti dari kekuasaan politik adalah tanggung jawab untuk menciptakan kebaikan bersama (Magnis-Suseno 1997: 235). Kekuasaan yang tidak memiliki orientasi etis akan jatuh ke dalam korupsi atau penyalahgunaan. Demokrasi menuntut bentuk kekuasaan yang berakar pada solidaritas dan komitmen moral terhadap sesama

warga negara. Lebih jauh lagi, reformulasi metafisika kekuasaan perlu mengintegrasikan aspek spiritual yang terbuka. Spiritualitas politik yang dimaksud bukan yang menjustifikasi dinasti, tetapi yang menegaskan bahwa kekuasaan adalah panggilan untuk melayani. Dalam arti ini, spiritualitas dan demokrasi tidak harus berlawanan, melainkan saling melengkapi. Spiritualitas menjaga kekuasaan tetap bermoral, sementara demokrasi menjaga kekuasaan tetap terbuka dan partisipatif. Akhirnya, reformulasi metafisika kekuasaan dalam kerangka demokrasi mengarah pada sintesis baru antara etika, rasionalitas, dan spiritualitas. Kekuasaan bukan lagi entitas metafisik yang diwariskan, tetapi energi moral yang diciptakan terus-menerus dalam relasi sosial (De Anna, 2020: 19). Dengan demikian, demokrasi yang sejati tidak hanya bertumpu pada sistem politik formal, tetapi juga pada kesadaran metafisik baru tentang manusia sebagai subjek bebas, rasional, dan bertanggung jawab.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena politik dinasti di Indonesia menunjukkan bahwa kekuasaan masih sering dipahami secara metafisik, sebagai sesuatu yang melekat pada individu atau garis keturunan tertentu. Pola pikir ini menjadikan kekuasaan bukan sebagai hasil kehendak rakyat, melainkan sebagai hak yang diwariskan secara kosmis. Akibatnya, demokrasi kehilangan esensinya sebagai sistem yang menegakkan kesetaraan dan kebebasan warga negara. Politik dinasti tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga masalah kesadaran metafisik yang menempatkan kekuasaan di luar kendali rasional manusia. Pemahaman metafisik tentang kekuasaan ini harus dikritisi agar demokrasi dapat berfungsi secara substantif. Kekuasaan, sebagaimana dijelaskan Foucault, tidak berada pada satu titik atau individu, melainkan menyebar dalam relasi sosial yang dinamis (Foucault, 1980: 93). Dengan kata lain, kekuasaan tidak dimiliki, tetapi dijalankan dalam jaringan interaksi antar manusia. Ketika kekuasaan dianggap sebagai milik pribadi atau keluarga, maka ia kehilangan dimensi etisnya dan berubah menjadi alat dominasi yang melanggar prinsip keadilan sosial.

Dalam konteks demokrasi modern, pembaruan cara berpikir menjadi penting agar kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai warisan, melainkan sebagai amanah. Demokrasi sejati hanya mungkin jika masyarakat mengakui bahwa kekuasaan bersumber dari kehendak rakyat, bukan dari legitimasi kosmis atau spiritual. Sejalan dengan pemikiran Magnis-Suseno, kekuasaan harus dipahami sebagai tanggung jawab moral terhadap sesama warga negara, bukan sebagai privilese turun-temurun (Magnis-Suseno, 1997: 235). Selain itu, reformasi budaya politik menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi. Pendidikan politik publik perlu menanamkan kesadaran bahwa kekuasaan adalah sarana untuk mewujudkan kebaikan bersama. Budaya penghormatan berlebihan terhadap keluarga penguasa harus digantikan oleh penghargaan terhadap kemampuan, etika, dan integritas. Kesadaran seperti ini akan membentuk masyarakat yang kritis dan menolak bentuk dominasi yang lahir dari politik dinasti.

Pemerintah dan lembaga politik juga perlu memperkuat regulasi yang membatasi praktik politik dinasti. Namun, hukum saja tidak cukup tanpa perubahan kesadaran kolektif. Reformasi demokrasi harus berjalan seiring dengan pembaruan moral dan spiritual masyarakat. Hanya dengan mengembalikan kekuasaan ke dalam kerangka etis dan rasional, demokrasi dapat tumbuh sebagai sistem yang benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat. Pada akhirnya, politik dinasti bukan hanya persoalan politik praktis, melainkan cermin dari cara manusia memahami kekuasaan. Jika akar metafisika kekuasaan tidak ditafsirkan ulang, demokrasi akan terus dirongrong oleh logika pewarisan dan sakralisasi kekuasaan. Karena itu, tugas utama demokrasi Indonesia hari ini adalah membangun kesadaran baru: bahwa kekuasaan sejati bukanlah warisan darah, tetapi hasil tanggung jawab moral dan pilihan sadar seluruh warga negara (De Anna, 2020: 21).

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A. I. (2023). The influence of political dynasty on the democracy climate. *Journal of Constitutional Law Society*, 2(1), 45–58. <https://doi.org/10.5555/jcls.v2i1.2023>
- Arendt, H. (1970). *On violence*. Harcourt, Brace & World.
- Aristotle. (1932). *Politics* (H. Rackham, Trans.). Harvard University Press.
- Beetham, D. (2019). The legitimisation of power revisited: Reflections on twenty years of research. *Journal of Political Power*, 12(3), 241–259. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2019.1668897>
- Dal Bó, E., Dal Bó, P., & Snyder, J. (2007). Political dynasties. *American Economic Review Papers & Proceedings*, 97(2), 192–196. <https://doi.org/10.1257/aer.97.2.192>
- De Anna, G. (2020). Political authority and metaphysical foundations. *Philosophical Studies*, 177(1), 15–25. <https://doi.org/10.1007/s11098-019-01333-2>
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. Pantheon Books.
- Gaus, G. (2020). Metaphysics of power and the fragility of democracy. *Philosophy & Social Criticism*, 46(5), 503–521. <https://doi.org/10.1177/0191453720908743>
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action: Reason and the rationalization of society* (Vol. 1). Beacon Press.
- Han, B.-C. (2018). *What is power?* Polity Press.
- Hardiman, F. B. (2018). *Ruang publik: Melacak partisipasi demokratis dari polis sampai cyberspace*. Kanisius.
- Heidegger, M. (1962). *Being and time*. Harper & Row.
- Indrawan, J., Putrawan, Y., & Hartanto, H. (2024). Oligarchy and dynastic politics in Indonesia. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.5555/igj.v8i1.2024>
- Kant, I. (1996). *The metaphysics of morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press.
- Kenawas, Y. C. (2023). The rise of dynastic politics in the post-Suharto era. *Contemporary Southeast Asia*, 45(2), 197–220. <https://doi.org/10.1355/cs45-2c>
- Latif, Y. (2021). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia.
- Levinas, E. (1969). *Totality and infinity: An essay on exteriority*. Duquesne University Press.

- Magnis-Suseno, F. (1997). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mukti, H. H., & Rodiyah. (2020). Dynasty politics in Indonesia: Tradition or democracy? *Journal of Law and Legal Reform*, 1(3), 531–538. <https://doi.org/10.5555/jllr.v1i3.2020>
- Permana, D. (2023). Political dynasties in the government system in Indonesia. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(3), 85–92. <https://doi.org/10.5555/ministrate.v5i3.2023>
- Permana, R. (2023). Politik dinasti dan tantangan demokrasi di Indonesia: Perspektif etika kekuasaan. *Jurnal Filsafat Nusantara*, 12(2), 87–98. <https://doi.org/10.5555/jfn.v12i2.2023>
- Plato. (1992). *The republic* (G. M. A. Grube, Trans.). Hackett Publishing.
- Suseno, F. M. (2020). *Filsafat sebagai ilmu kritis*. Kanisius.
- Taufiq, M., Adilansyah, A., & Hidayat, R. (2025). Political dynasties in democratic contexts: A comprehensive bibliometric analysis using Scopus data. *TUR Review*, 28(1), 421–460. <https://doi.org/10.14456/tureview.2025.16>